

Print (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/emusrenbang2019/beritaacara/printnew>)



BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANGNAS 2018

Prioritas Nasional : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Program Prioritas : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
Tanggal : 08 May 2018
Waktu : 10:12:47 WIB
KODE SESI : EMUS01532

	Nama	Tanda Tangan
Provinsi : Kalimantan Utara	Tri Wahyu Wibowo	
Kepala Persidangan : Direktur Otonomi Daerah	Aryawan Soetiarso	
Pembina Daerah : Kasi Wil II Subdit Pendidikan Ditjen Bina Bangsa	Helda Nusi	
Pembina Tata Ruang : Kasie Datin dan Kemitraan	Kristanto Hadi	
Notulis : Staf	Gary Adam	

Pada hari ini, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah membahas dan menyepakati :

FORMAT 1A : PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
1	Disepakati Masuk dalam Renja K/L	0	0	0.00	0.00

Copyright © 2018 Alus (<http://alus.co/produk.php>) . All rights reserved. | Bantuan Hubungi 021-31934195

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
2	Disepakati Melalui Pendanaan SWASTA/KPBU/PINA	-	0	-	0.00
3	Belum Ada Kesepakatan	-	0	-	0.00
4	Ditolak	0	0	0.00	0.00

FORMAT 1B : USULAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
1	Disepakati Masuk dalam Renja K/L	0	0	0.00	0.00
2	Disepakati Melalui Pendanaan SWASTA/KPBU/PINA	-	0	-	0.00
3	Belum Ada Kesepakatan	-	0	-	0.00
4	Ditolak	0	0	0.00	0.00

FORMAT 2 : PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
1	Disepakati Pendanaan APBD Provinsi	0	0	0.00	0.00
2	Disepakati Melalui Pendanaan SWASTA/KPBU/PINA	-	0	-	0.00
3	Belum Ada Kesepakatan	-	0	-	0.00
4	Ditolak	0	0	0.00	0.00

FORMAT 3 : PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
1	Disepakati Pendanaan APBD Kab/Kota	0	0	0.00	0.00
2	Disepakati Melalui Pendanaan SWASTA/KPBU/PINA	-	0	-	0.00


Copyright © 2018 [Ajms \(http://ajms.co/produk.php\)](http://ajms.co/produk.php). All rights reserved. | Bantuan Hubungi 021-31934195

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
3	Belum Ada Kesepakatan	-	0	-	0.00
4	Ditolak	0	0	0.00	0.00

FORMAT 7 : INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN PENDANAAN SWASTA/KPBU/PINA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

No	Keterangan	Total Proyek		Dana	
		Diskusi Online	Musrenbangnas	Diskusi Online	Musrenbangnas
1	Disepakati Masuk dalam Renja K/L	0	0	0.00	0.00
2	Disepakati Melalui Pendanaan SWASTA/KPBU/PINA	-	0	-	0.00
3	Belum Ada Kesepakatan	-	0	-	0.00
4	Ditolak	0	0	0.00	0.00

DAFTAR PESERTA KEMENTERIAN / LEMBAGA

KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA	TANDA TANGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN		
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Arish	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		

CATATAN

Catatan Pendahuluan

Kementerian PPN/Bappenas

1. Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk sebagai salah satu bidang di DAK.
2. Jika daerah belum mengusulkan DAK khususnya untuk afirmasi dan penugasan, mungkin dapat mengajukan saat perpanjangan pada 21-28 Mei 2018.
3. Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100, Universal Akses Air Minum, Kumuh dan Sanitasi. Karena keterbatasan alokasi, maka perlu ada penggalan terhadap pendanaan lainnya seperti DAK.

Kementerian ATR

1. Sudah ada Peraturan Presiden tentang PLBN.
2. Ada 4 PKSN di Kalimantan Utara, antara lain PKSN Nunukan, PKSN Simanggalis, PKSN Long Bidang, PKSN Long Nawang. PKSN difokuskan untuk pengembangan kawasan permukiman.

Kementerian PUPR

1. Untuk kegiatan Cipta Karya yang dimasukkan dalam Renja K/L, yaitu sebesar 432 M. Usulan prakonreg untuk Kalimantan Utara 359 M, namun di dominasi untuk penanganan PLBN (Direktif Presiden). Pagu saat pembahasan prakonreg adalah 20 T, namun *exercise* nya adalah 12 T. Untuk kegiatan penanganan kumuh, air minum dan sanitasi hanya 132 M.
2. Usulan kab/kota yang sifatnya fisik adalah:
 1. Kegiatan PKP : Peningkatan kualitas kawasan agropolitan (5 M)
 2. Kegiatan Penataan Kawasan Strategis Kota Tarakan (7,5 M)
3. Untuk tahun 2019, tidak ada alokasi kegiatan air minum di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Untuk bidang perumahan, alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada saat prakonreg. Sesuai prakonreg, untuk Kota Tarakan ada pembangunan rumah susun MBR (16,8 M).
5. Peningkatan kualitas rumah swadaya di Kab. Malinau (8,775 M), Kab. Bulungan (9,75 M), Kab. Tana Tidung (8,775 M), Kab. Nunukan (11,7 M) dan Kota Tarakan (9,75 M). Total untuk pembangunan rumah swadaya adalah 66 M.
6. Belum ada usulan untuk pembangunan rumah khusus saat Prakonreg.

KLHK

Copyright © 2018 Alus (<http://alus.co/produk.php>) . All rights reserved. | Bantuan Hubungi 021-31934195

1. KLHK tidak ada kegiatan di Kalimantan Utara. Untuk usulan dari Provinsi, dapat diajukan melalui DAK, khusus untuk penanganan sampah. Untuk yang terkait dengan kehutanan bisa diajukan pada PN 4.
2. KLHK diprioritaskan pada 70% kegiatan penanaman. Sehingga banyak kegiatan yang diluar penanaman dikurangi.
3. Untuk PN 1 PP 4, menu DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah bank sampah, rumah pengomposan, *dump truck* dan *arm roll*.

BNPP

1. Ada 5 lokasi prioritas di Kab. Malinau. Sedangkan di Kab. Nunukan ada 10 lokasi prioritas perbatasan.

Catatan Pembahasan

KP 1 - Penyediaan Akses Hunian Layak

1. Ada 2 kegiatan, yaitu pembangunan rumah susun dan rumah swadaya.
2. Untuk rumah swadaya ditujukan untuk peningkatan kualitas, bukan untuk pembangunan baru. Sifatnya adalah stimulant, dengan alokasi per unit adalah 19,5 juta, dimana 2,5 juta untuk upah dan 2 juta untuk pendampingan, sedangkan untuk material tetap 15 juta. Hal ini sudah tercantum dalam Permen PUPR.
3. Perlu dipastikan *readiness criteria* untuk setiap proyek yang diusulkan, seperti usulan proposal, ketersediaan lokasi dan lahan.

KP 2 - Penyediaan Air minum dan Sanitasi Layak

1. Untuk kegiatan air minum, mungkin dapat dipilah kegiatan-kegiatan yang dapat dimasukkan/diproses.
2. Prioritas kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh, seperti Kawasan Karangrejo.
3. Untuk kegiatan air minum, ada program Pamsimas untuk air minum perdesaan. Namun Kalimantan Utara belum masuk sebagai lokasi Pamsimas.
4. Untuk lokasi air minum, ada penambahan lokasi, yaitu di Mamburungan Timur, Tanjung Pasir, dan Pantai Amal, Tarakan.
5. Untuk kegiatan yang termasuk dalam kategori prioritas, diharapkan *readiness criterianya* dipersiapkan sebaik mungkin.

KP 3 - Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

1. Beberapa Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak masuk dalam lokasi prioritas untuk DAK, sehingga tidak bisa dilakukan pengusulan.
2. Penentuan lokasi prioritas DAK dilakukan melalui *multilateral meeting*. Jumlah lokasi prioritas tiap tahun berbeda-beda. Karena keterbatasan anggaran, maka penentuan lokasi prioritas disesuaikan dengan mana yang mendukung prioritas nasional.

Catatan Umum: